

# Implementasi *civic disposition* peserta didik di Kurikulum Merdeka

Finanda Dwi Triaswari<sup>a,1</sup>, Sutrisno<sup>b,2</sup>, Ambiro Puji Asmaroini<sup>c,3</sup>

<sup>abc</sup> Program Studi PPKn Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia

<sup>1</sup> [finandadwi25@gmail.com](mailto:finandadwi25@gmail.com); <sup>2</sup> [Sutrisno@umpo.ac.id](mailto:Sutrisno@umpo.ac.id); <sup>3</sup> [ambiroop@gmail.com](mailto:ambiroop@gmail.com);

\* Email: [finandadwi25@gmail.com](mailto:finandadwi25@gmail.com)

## INFO ARTIKEL

*Sejarah Artikel:*

Diterima: 14 Maret 2023

Direvisi: 19 Juni 2023

Disetujui: 23 Oktober 2023

Tersedia Daring: 1 Januari 2024

*Kata Kunci:*

*Karakter Kewarganegaraan*

*Kurikulum Merdeka*

*Pendidikan Pancasila*

## ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian campuran (mixed methods) dengan pendekatan studi analisis di SMK PGRI 2 Ponorogo khususnya pada kelas X. Adapun penelitian ini, dalam pengumpulan data dengan menggunakan prosedur wawancara, angket, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan menggolongkan, mereduksi dan menghilangkan data yang tidak diperlukan, selanjutnya dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa civic disposition dapat di kembangkan melalui beberapa kegiatan diantaranya 1) pembiasaan melalui tata tertib di sekolah yang diimplementasikan melalui ayat-ayat yang ada di dalam tata tertib; 2) pembelajaran pada mata pelajaran pendidikan pancasila melalui monitoring dan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5); 3) komitmen antara bapak/ibu guru sebagai upaya dalam membantu melaksanakan dan mengembangkan karakter kewarganegaraan peserta didik; 5) evaluasi melalui supervisi untuk mengetahui bagaimana progress karakter pada peserta didik untuk dilakukan perbaikan kedepannya dan memaksimalkan penguatan civic disposition di sekolah.

## ABSTRACT

*Keywords:*

*Citizenship Character*

*Independent Curriculum*

*Pancasila Education*

*This research is a mixed method with an analytical study approach at SMK PGRI 2 Ponorogo, especially in class X. As for this research, in collecting data using interviews, questionnaires, and documentation procedures. Data analysis techniques by classifying, reducing and eliminating unnecessary data, are then presented descriptively. in order; 2) learning in Pancasila education subjects through monitoring and Projects to Strengthen Pancasila Student Profiles (P5); 3) commitment between teachers as an effort to help implement and develop students' civic character; 5) evaluation through supervision to find out how the character progresses in students for future improvements and maximizes the strengthening of civic disposition at school.*

©2024, Finanda Dwi Triaswari, Sutrisno, Ambiro Puji Asmaroini  
This is an open access article under CC BY-SA license



## 1. Pendahuluan

Pada era industri 4.0 ini, tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi semakin pesat berkembang dan semakin maju setiap harinya. Pembelajaran Abad 21 dengan kehadiran teknologi dalam dunia pendidikan, menuntut peserta didik untuk kreatif, inovatif, berfikir kritis serta metakognitif dan sehingga menjadikan peserta didik memiliki kemampuan berkomunikasi dan bekerja secara kolaborasi (berkelompok), dengan harapan bahwa pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dapat dijadikan bekal hidup dalam masyarakat yang memiliki karakter baik lokal maupun global dan dapat dipertanggungjawabkan secara personal maupun sosial masyarakat. (Prihatmojo et al., 2019)

Di balik dampak positif adanya perkembangan teknologi jika tidak diimbangi oleh penanaman pendidikan karakter maka akan menimbulkan krisis karakter tersebut. Semakin maju teknologi dapat menyebabkan mudahnya nilai-nilai karakter, sehingga diperlukan fondasi pendidikan karakter pada peserta didik di Abad 21 ini. Kenyataan saat ini, pendidikan di Indonesia dihadapkan pada berbagai masalah yaitu sistem pembelajaran yang belum memadai dan degradasi moral yang terjadi di masyarakat Indonesia pada umumnya, salah satunya di kalangan sebagian dari sekolah yang dirasa belum mencapai standar pendidikan berkarakter. (Martini, 2022)

Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa kejadian yang dikabarkan melalui pemberitaan media massa tentang contoh karakter atau moral siswa yang rusak atau kurang baik diperlihatkan, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Hal ini terjadi di daerah terpencil juga, masih banyak keluhan mengenai pendidikan karakter dan kurang mendapatkan perhatian pemerintah. Salah satu contoh nyata pemberitaan media massa tentang rusaknya moral pada peserta didik yaitu dikutip dari detik news (2023) bahwa ada sekitar 176 anak di Kabupaten Ponorogo yang mengajukan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama karena sebagian beralasan hamil di luar nikah. Hal tersebut juga menjadi salah satu contoh dari rusaknya moral pada peserta didik akibat pergaulan bebas di luar lingkungan sekolah. Contoh tersebut juga menjadi PR bagi seluruh pendidik untuk menanamkan pengetahuan mengenai bagaimana pentingnya menjaga karakter baik dalam diri.

Dengan terjadinya kerusakan moral tersebut, nilai-nilai pendidikan karakter abad 21 yang diharapkan dapat membentuk karakter pada generasi muda yaitu religius, jujur, toleransi terhadap keberagaman, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat nasionalisme, cinta tanah air, berprestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial dan bertanggungjawab. (Amran et al., 2019). Yang nilai-nilai tersebut dapat diimplementasikan pada kurikulum merdeka.

Program Kurikulum Merdeka adalah kebijakan pengembangan yang dikeluarkan Kemendikbudristek untuk pembelajaran peserta didik di sekolah sebagai langkah mentransformasi Pendidikan demi terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) unggul Indonesia yang memiliki Profil Pelajar Pancasila (Annisa Rohimah Hasri Hasibuan, Aufa, Lola Khairunnisa, Wenni Arobiya Siregar 2022). Kurikulum Merdeka memuat penguatan Profil Pelajar Pancasila untuk memetakan atau merujuk Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) sehingga dalam implementasinya dapat diselaraskan. Dimensi Profil Pelajar Pancasila adalah karakter dan kompetensi fondasi yang perlu dikembangkan oleh satuan Pendidikan bagi peserta didik. Dimensi-dimensi dalam Profil Pelajar Pancasila yaitu: 1) Beriman, Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 2) Kebhinekaan Global, 3) Gotong royong, 4) Mandiri, 5) Bernalar kritis, dan 6) Kreatif (Annisa Rohimah Hasri Hasibuan, Aufa, Lola Khairunnisa, Wenni Arobiya Siregar 2022).

Penanaman pendidikan karakter pada peserta didik dalam Kurikulum Merdeka dapat diterapkan melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dimana di dalamnya memuat tiga hal yang perlu diterapkan dalam menghadapi kemajuan jaman dan teknologi diharuskan dengan mengembangkan *civic competences*. *Civic competences* merupakan kompetensi kewarganegaraan dimana di dalamnya terdapat aspek-aspek yang meliputi *civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), *civic skills* (keterampilan kewarganegaraan), dan *civic disposition* (karakter kewarganegaraan). (Pangalila, 2017). Pendidikan karakter berkaitan dengan Kurikulum Merdeka dimana kurikulum ini menawarkan 3 karakteristik diantaranya pembelajaran berbasis proyek, pengembangan *soft skill* dan karakter sesuai dengan profil pelajar pancasila, pembelajaran pada materi esensial dan struktur kurikulum yang lebih fleksibel.

Karakter kewarganegaraan (*civic disposition*) merupakan sikap dan kebiasaan berpikir warga negara yang menopang berkembangnya fungsi sosial yang sehat dan jaminan kepentingan

umum dari sistem demokrasi. Secara konseptual, *civic disposition* mencakup sejumlah karakteristik kepribadian yakni kesopanan, tanggung jawab individual, disiplin diri, kepedulian terhadap masyarakat, keterbukaan pikiran, sikap kompromi, keberagaman dan toleransi, ketegaran, keteguhan hati dan komitmen terhadap bangsa dan prinsipnya. (Halimah & Nurlela, 2020).

*Civic disposition* (karakter kewarganegaraan) merupakan watak atau sifat yang harus dimiliki warga negara untuk mendukung keterampilan dan pengetahuan kewarganegaraan. *Civic disposition* bertujuan untuk mewujudkan dan menumbuhkan warga negara yang mempunyai karakter yang baik (Mulyono, 2017).

Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih oleh penulis yaitu di SMK PGRI 2 Ponorogo yang merupakan salah satu sekolah kejuruan yang ada di Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan pengamatan awal yang peneliti lakukan, sekolah ini telah menerapkan Kurikulum Merdeka untuk kelas X. Selain itu sekolah ini juga merupakan salah satu sekolah kejuruan terbaik di Kabupaten Ponorogo yang terkenal dengan pembiasaan kedisiplinan dan karakter yang baik pada peserta didik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah yang selaras dengan *Civic Disposition* serta kurikulum merdeka termasuk di dalamnya memuat mengenai Profil Pelajar Pancasila.

## 2. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran (*mixed methods*). Pada penelitian campuran ini diawali dengan metode kualitatif yang kemudian dilanjutkan dengan metode kuantitatif. Penelitian campuran (*mixed methods*) adalah suatu metode penelitian antara metode kuantitatif dengan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, dan objektif (John W. Creswell, 2010).

Prosedur pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu: pertama, wawancara kepada Waka Kurikulum dan Guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Kedua, dokumentasi dengan mengumpulkan tata tertib sekolah, raport P5, dan dokumentasi kegiatan selama melakukan penelitian di sekolah. Ketiga, penyebaran angket yang ditujukan kepada peserta didik kelas X SMK PGRI 2 Ponorogo. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### A. *Civic Disposition* dalam Kurikulum Merdeka

Banyak persoalan kebangsaan dihadapi bangsa Indonesia pada era saat ini. Kuatnya arus globalisasi semakin menambah rumit persoalan kebangsaan Indonesia. Saat ini Indonesia mengalami dekarakterisasi yang ditandai dengan persoalan-persoalan kebangsaan seperti: korupsi, kekerasan atas nama agama, kerusuhan antar siswa. Semua permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia bermuara pada rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

*Civic disposition* (karakter kewarganegaraan) didefinisikan sebagai watak, sifat, atau karakter yang harus dimiliki warga negara untuk mendukung keterampilan dan pengetahuan kewarganegaraan. *Civic disposition* bertujuan untuk mewujudkan dan menumbuhkan warga negara yang mempunyai karakter yang baik (Mulyono, 2017). Sedangkan dalam kurikulum merdeka memuat penguatan Profil Pelajar Pancasila untuk memetakan atau merujuk Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) sehingga dalam implementasinya dapat diselaraskan. Dimensi Profil Pelajar Pancasila adalah karakter sebagai fondasi yang perlu dikembangkan oleh satuan Pendidikan bagi peserta didik. Profil Pelajar Pancasila dalam Kurikulum Merdeka digunakan sebagai acuan yang diimplementasikan pada setiap mata pelajaran khususnya dalam Pendidikan Pancasila.

Konsep Profil Pelajar Pancasila bermula dari filosofi Ki Hajar Dewantara yang artinya pendidikan itu harus memerdekakan anak dalam belajar. Memerdekakan disini melalui pembebasan terhadap apa yang dia sukai, apa yang dia minati sesuai minat dan bakat anak. Konsep Merdeka Belajar juga harus menganut asas “*Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani*”. Artinya guru memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pembentukan karakter siswa. Guru harus menjadi teladan jika di depan, menjadi motivator dan semangat jika ditengah, serta menjadi pendorong dari belakang siswa, agar nantinya mereka mampu menjadi orang yang mandiri. (Rudiawan & Asmaroini, 2022).

Pada Profil Pelajar Pancasila, kompetensi dan karakter esensial yang dapat dipelajari lintas disiplin ilmu tertuang dalam 6 dimensi. Setiap dimensi memiliki beberapa elemen yang menggambarkan lebih jelas kompetensi dan karakter esensial yang dimaksud. Selaras dengan tahap perkembangan peserta didik serta sebagai acuan bagi pembelajaran dan asesmen, indikator kinerja pada setiap elemen dipetakan dalam pada setiap fase. Secara umum 6 dimensi Profil Pelajar Pancasila beserta elemen di dalamnya menurut buku PBB 2021 yaitu Beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia; Berkebhinekaan global; Gotong royong; Mandiri; Bernalar Kritis; Kreatif. (Rudiawan & Asmaroini, 2022)

Jika dilihat dari gambar di atas, keenam profil pelajar pancasila ini memiliki kesatuan dan sama-sama penting. Penerapan *civic disposition* atau karakter kewarganegaraan dalam kurikulum merdeka dapat diwujudkan melalui konsep Profil Pelajar Pancasila. Hal tersebut dapat dilihat dari setiap karakteristik melalui *civic disposition* yang saling berkesinambungan dan *discover* oleh 6 dimensi dalam Profil Pelajar Pancasila. Misalnya karakteristik dalam *civic disposition* kesopanan, tanggungjawab, disiplin diri, kepedulian terhadap masyarakat, serta keteguhan hati yang sesuai dengan dimensi Profil Pelajar Pancasila pertama yaitu Beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia. Karakteristik keberagaman dan toleransi, serta komitmen terhadap bangsa dan prinsipnya yang sesuai dengan dimensi Berkebhinekaan global. Karakteristik sikap kompromi yang termaktub dalam dimensi gotong royong. Karakteristik keterbukaan pikiran yang berkaitan dengan dimensi kreatif dan bernalar kritis. Serta karakteristik ketegaran yang sesuai dengan dimensi mandiri.

### **B. Strategi Penguatan *Civic Disposition* Peserta Didik dalam Kurikulum Merdeka**

Istilah strategi pada mulanya digunakan dalam dunia militer yang diartikan sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk memenangkan suatu peperangan. Strategi adalah siasat perang, ilmu siasat perang, tempat yang baik menurut siasat perang. Strategi digunakan untuk memperoleh kesuksesan atau keberhasilan dalam mencapai tujuan, rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus (Eni 2011). Menyusun strategi untuk suatu rencana adalah bagian tersulit dari proses perencanaan. Jika strategi tepat, maka segalanya akan berjalan dengan lancar. Strategi menjadi penting karena memberikan fokus terhadap usaha yang dilakukan, yang membantu untuk mendapatkan hasil yang maksimal serta dapat melihat jauh kedepan atas apa yang akan kita lakukan. Pada hakekatnya strategi adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai suatu tujuan (Susetyo, ., and . 2018).

Pelaksanaan *civic disposition* sangat penting untuk dilakukan. Pelaksanaan *civic disposition* atau karakter kewarganegaraan perlu dikembangkan di sekolah terutama pada pembelajaran di sekolah karena pendidikan berperan penting dalam pembentukan karakter peserta didik, pembentukan karakter ini mampu untuk membangun potensi yang berkembang (Ramdhani, 2017). Terkait akan hal itu *civic disposition* sangat erat kaitannya dengan pembentukan karakter peserta didik yang harus dipersiapkan secara matang dan dibekali moral yang baik sehingga dapat menjadi *good be citizenship* agar dapat ikut berperan aktif dalam kehidupan (Rahmatiani & Indriyani, 2020). Pembentukan karakter peserta didik, dengan demikian sangat diperlukan sebagai generasi penerus bangsa yang akan membawa bangsa kearah yang lebih baik.

Karakter yang baik harus dimiliki oleh generasi muda sebagai generasi penerus bangsa yang akan menentukan keberlangsungan watak negara ini. Oleh karena itu sebagai warga negara yang baik atau *good citizen* sudah sepatutnya kita memiliki dan menanamkan watak yang baik dalam kehidupan. Hal ini tentu saja juga harus dimiliki oleh peserta didik terutama di lingkungan sekolah. Bila kita ketahui beserta didik merupakan tonggak pembangunan bangsa yang akan melanjutkan cita-cita bangsa ini kedepannya yang diharapkan mampu menghadapi persoalan-persoalan krisis karakter di negara ini sehingga dapat berkurang. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan penerapan nilai-nilai karakter kewarganegaraan (*civic disposition*) untuk membentuk karakter yang baik pada peserta didik. Branson (1999) menjelaskan bahwa *civic disposition* bertujuan untuk menumbuhkan karakter warga negara, baik karakter privat seperti; kesopanan, disiplin, tanggungjawab, ketegaran/kesabaran, dan keteguhan hati. Maupun karakter publik seperti; peduli, kompromi, keterbukaan pikiran, komitmen terhadap bangsa, serta keberagaman dan toleransi.

Dalam rangka penguatan karakter kewarganegaraan atau *civic disposition*, setiap sekolah memiliki cara atau strategi sendiri dalam pelaksanaannya. Strategi digunakan untuk memperoleh kesuksesan atau keberhasilan dalam mencapai tujuan, rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Pada hakekatnya strategi adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai suatu tujuan (Susetyo et al., 2018). Apabila penguatan karakter ini berjalan dengan baik di lingkungan sekolah, maka akan meningkatkan *civic disposition* pada peserta didik. Dan apabila *civic disposition* tersebut berjalan dengan baik disekolah, maka juga akan menunjang penguatan kurikulum merdeka. Oleh karena itu, untuk mencapai hal tersebut tentunya baik pendidik maupun sekolah memiliki peran yang sama dalam bersinergi mengolah strategi demi keberhasilan penguatan *civic disposition*.

Selain penguatan terhadap *civic disposition* atau karakter kewarganegaraan. Dirasa sekolahun perlu mengembangkan strategi dalam penguatan kurikulum merdeka sebagai kurikulum baru yang ditetapkan oleh Kemendikbud. Bagaimanapun sebagai pendidik, maupun lembaga sekolah harus terus terbuka dalam pembaharuan pendidikan salah satunya dalam pengembangan kurikulum yang kemungkinan dapat terus berubah sesuai dengan perkembangan pendidikan kedepannya. Berdasarkan hasil penelitian maka strategi yang dilakukan dalam penguatan *civic disposition* di sekolah ini terdiri dari 4 pendekatan yaitu pembiasaan melalui tata tertib, pembelajaran pada mata pelajaran pendidikan pancasila melalui monitoring harian dan P5, komitmen pendidik, dan evaluasi sebagai berikut.

### **C. Pembiasaan melalui Tata Tertib**

Pemberlakuan tata tertib di sekolah yang diimplementasikan melalui ayat-ayat yang ada di dalam tata tertib tersebut, dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi yang sesuai dengan bentuk pelanggarannya. Tata tertib ini berlaku baik ketika proses belajar-mengajar di dalam kelas maupun kegiatan di lingkungan sekolah, keduanya sama-sama memakai tata tertib sebagai peraturan yang telah dibuat dan disepakati oleh sekolah sebagai salah satu strategi dalam menumbuhkan karakter yang baik pada peserta didik. Upaya pembentukan karakter kewarganegaraan dengan pembiasaan melalui tata tertib telah dilaksanakan sejak lama meski belum diterapkannya kurikulum merdeka di SMK PGRI 2 Ponorogo. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Tata Tertib yang terdiri atas delapan bab dan duabelas pasal. Adanya kurikulum merdeka merupakan hal yang memperkuat tata tertib tersebut. Pembiasaan tata tertib di SMK PGRI 2 Ponorogo berkaitan dengan dua dari sepuluh *civic disposition* yaitu disiplin dan kompromi.

Karakter disiplin yaitu peserta didik memasuki gerbang sekolah tepat waktu, jarang ada yang terlambat masuk kelas, berbaris rapi ketika akan memasuki kelas, mengumpulkan tugas tepat waktu, selalu menggunakan seragam dan atribut lainnya secara lengkap, melaksanakan tata tertib di sekolah dan disiplin dalam membagi waktu. Sedangkan pada karakter kompromi

ditunjukkan dengan ikut serta dalam tugas kelompok, mengikuti kegiatan bengkel 5R, melakukan kerja bakti di lingkungan sekolah, dan bekerjasama dengan teman sekelas dalam hal kebersihan kelas.

#### **D. Pembelajaran pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila melalui Monitoring dan P5**

Strategi pelaksanaan *civic disposition* di kurikulum merdeka pada proses pembelajaran dilakukan melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila lewat pengerjaan soal yang dapat dilakukan pendidik pada saat Penilaian Formatif atau penilaian Sumatif seperti Sumatif Tengah Semester (STS) dan Sumatif Akhir Semester (SAS) yang nantinya dari pengerjaan soal-soal tersebut akan diperoleh nilai dan dari nilai inilah yang nantinya digunakan sebagai untuk melihat seberapa jauh kemampuan peserta didik dalam memahami setiap bab/sub-bab yang di dalamnya mengandung 4 elemen Pendidikan Pancasila yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Pengerjaan soal tersebut nantinya dapat diintegrasikan sebagai monitoring untuk melihat bagaimana pemahaman peserta didik dalam karakter kewarganegaraan yang juga terdapat dalam setiap bab/sub-bab pembelajaran.

Monitoring bertujuan untuk mengidentifikasi adanya berbagai penyimpangan dalam proses pendidikan karakter, selanjutnya hal tersebut dijadikan umpan balik untuk perbaikan dalam perencanaan, dan pelaksanaan. (Mughtar & Suryani, 2019). Monitoring dilakukan oleh pendidik dengan keterlibatan peserta didik melalui penilaian normatif dan sumatif, tiga dari sepuluh karakteristik *civic disposition* dan rapor P5. Terkait 3 dari sepuluh karakteristik *civic disposition*, pada karakter tanggungjawab dibuktikan dengan peserta didik turut aktif dalam menjaga kelas, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru tepat waktu dan tidak menunda tugas, dan siap diberi sanksi ketika melakukan kesalahan. Pada karakter ketegaran ditunjukkan dengan peserta didik yang mampu mengolah dan mengontrol emosinya.

Sedangkan pada keterbukaan pikiran ditunjukkan dengan peserta didik mampu berpikir kritis dan menyampaikan ide atau pendapatnya dengan bijak melalui diskusi-diskusi, baik dengan sesama teman maupun dengan yang lebih dewasa. Penilaian melalui rapor P5 dilakukan oleh guru secara obyektif. Hal tersebut berguna untuk mengetahui perkembangan peserta didik secara individual, sehingga karakter yang masih kurang dapat ditingkatkan secara intensif. Dari yang diharapkan dalam pelaksanaan pembentukan karakter di sekolah, karakter dibentuk oleh pola perilaku yang didasari pada dimensi moral yang baik, bukan dimensi moral buruk pada diri seseorang (Budiwibowo, 2016). Sejalan dengan hal tersebut dalam hal mengintegrasikan nilai karakter kepada siswa dalam kegiatan belajar berarti mentautkan atau menerapkan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran dalam membentuk serta membina karakter kepribadian siswa sesuai dengan jati diri bangsa (Rahmatiani & Saylendra, 2021)

#### **E. Komitmen Pendidik melalui Keteladanan**

Komitmen antara bapak/ibu guru melalui keteladanan sebagai upaya dalam membantu melaksanakan dan mengembangkan karakter kewarganegaraan (*civic disposition*) pada peserta didik. Bentuk komitmen ini yaitu dengan bersinergi dengan bapak/ibu guru sebagai upaya dalam membantu melaksanakan dan mengembangkan karakter kewarganegaraan (*civic disposition*) pada peserta didik. Pendidik merupakan teladan utama dalam lingkup sekolah. Pembentukan karakter dapat berjalan sebagaimana mestinya ketika guru juga terlibat secara langsung dengan memberikan tauladan. Hal tersebut dilakukan agar peserta didik mampu meniru dan menerapkan secara berkelanjutan baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat.

Pada komitmen melalui keteladanan, melibatkan empat dari sepuluh karakter kewarganegaraan, yaitu kesopanan yang dilakukan dengan peserta didik membungkuk ketika berjalan melewati guru, menjawab salam dari guru ketika di dalam kelas, berpakaian sopan, budaya 3S, tidak berbicara ketika seseorang lainnya sedang berbicara, dan menghargai sesama teman. Pada karakter kepedulian ditunjukkan dengan peserta didik yang membantu teman yang mengalami kesulitan, berbagi makanan dengan teman, membuang sampah di tempatnya, dan

memberikan sumbangan atau berbagi kepada teman yang sedang berduka. Pada karakter keberagaman dan toleransi ditunjukkan dengan peserta didik yang mampu menghargai dan menghormati teman yang berbeda agama, tidak memandang ras dan suku orang lain berasal, tidak membedakan teman, dan menghargai pendapat teman yang berbeda. Sedangkan pada karakter keteguhan hati, peserta didik menunjukkan dengan tegas dalam memimpin dan mengkoordinasi kelas, tidak mudah menyerah ketika mendapat nilai jelek, dan mau meningkatkan kualitas diri.

#### **F. Evaluasi melalui Supervisi**

Evaluasi yang dilakukan oleh sekolah untuk mengetahui bagaimana *progress* karakter pada peserta didik untuk dilakukan perbaikan kedepannya dan memaksimalkan penguatan *civic disposition* di sekolah. Evaluasi dapat dilakukan oleh pihak sekolah maupun oleh pendidik. bentuk evaluasi ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk membentuk *civic disposition* pada peserta didik yakni melalui penilaian sikap, guru dapat melakukan evaluasi terkait sikap peserta didik sehingga jika ditemukan sikap peserta didik yang tidak sesuai maka akan diberikan pembinaan dan bimbingan lebih lanjut kepada peserta didik tersebut (Atmaja and Info 2022).

Dalam pelaksanaan penguatan karakter kewarganegaraan atau *civic disposition* melalui kurikulum merdeka turut menjumpai hal-hal diluar yang diharapkan. Evaluasi merupakan salah satu bentuk upaya untuk melihat sudah sejauh mana keberhasilan suatu program terlebih dalam penguatan keempat elemen dalam Pendidikan Pancasila. Evaluasi yang dapat dilakukan sekolah yaitu dengan supervisi. Supervisi merupakan suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Sedangkan menurut Manullang, (2005) supervisi merupakan suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula (Kristiawan et al., 2019).

Supervisi sangat diperlukan dalam lembaga pendidikan, karena salah satu kompetensi Kepala Sekolah adalah Supervisi. Supervisi dalam lembaga pendidikan ada dua aspek yaitu (1) supervisi akademik, yaitu bantuan profesional kepada guru dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran atau bimbingan untuk mempertinggi hasil belajar siswa. Supervisi akademik ini juga ada dua bagian yaitu (a) supervisi kelas; dan (b) supervisi klinis. Fokus dari supervisi kelas dan klinis adalah guru; dan (2) supervisi manajerial, yaitu mengawasi orang yang menjadi manajer atau Kepala Sekolah, yang terdiri dari pengembangan staf/tenaga kependidikan dan juga mengukur kinerja Kepala Sekolah (Kristiawan et al., 2019). Dengan demikian, supervisi dapat dijadikan sebuah strategi yang digunakan sekolah dalam hal penguatan pelaksanaan pendidikan pancasila pada kurikulum merdeka. Supervisi bertujuan untuk melihat iklim guru pada saat mengajar, apakah sudah menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan pedoman pada kurikulum merdeka.

Sekolah memang perlu mengadakan supervisi sebagai salah satu bentuk evaluasi untuk melihat ketercapaian pelaksanaan kurikulum dalam pembelajaran di kelas yang dilakukan melalui pembinaan berupa bimbingan atau tuntunan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan peningkatan mutu belajar-mengajar pada khususnya serta membantu guru untuk dapat mengevaluasi aktivitasnya dalam konteks tujuan aktivitas perkembangan peserta didik. Di samping itu, pada setiap pelaksanaan suatu program pastilah terdapat kelebihan dan kekurangan. Apalagi dalam pelaksanaan nilai-nilai karakter di sekolah yang tidak selalu dapat berjalan dengan baik. Salah satu contoh kelebihan dalam pelaksanaan karakter kewarganegaraan (*civic disposition*) dalam kurikulum merdeka ini adalah pihak sekolah maupun pendidik berkomitmen dan bersinergi dalam menguatkan pelaksanaan pendidikan karakter, dan pelaksanaan tersebut berjalan dengan baik serta terlihat sangat jarang ada peserta didik yang melanggar aturan sekolah yang ada di dalam tata tertib hal tersebut dibuktikan dengan nilai pada raport P5 peserta didik

yang menunjukkan bahwa mayoritas peserta didik telah berkembang sesuai harapan dalam 4 dimensi pada P5.

Untuk kelemahannya yang terlihat menonjol disini adalah mengenai pemahaman peserta didik mengenai teori dan definisi tentang *civic disposition* atau karakter kewarganegaraan yang kurang. Walaupun dalam pelaksanaannya sudah terlaksana dengan baik, namun disini lain perlu juga ditanamkan pada peserta didik mengenai definisi karakter kewarganegaraan tersebut sehingga dapat seimbang satu sama lain. Oleh karena itu, peran pendidik disini sangat diperlukan dalam menyampaikan materi dan memberikan pemahaman terhadap peserta didik tentang karakter kewarganegaraan. Selain itu, pemahaman pendidik mengenai kurikulum merdeka juga perlu ditingkatkan. Salah satunya dalam Profil Pelajar Pancasila yang seharusnya memuat 6 dimensi yang tidak dapat dipisahkan atau ditiadakan salah satunya. 6 dimensi tersebut mencakup Beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME serta berakhlak mulia, Berkebhinekaan Global, Gotong royong, Kreatif, Mandiri, dan Bernalar kritis. Namun disini, terkait penilaian Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) hanya terdapat 4 dari 6 dimensi profil pelajar pancasila.

#### **4. Kesimpulan**

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah ada dan dikembangkan menjadi beberapa teori maka hasil teori ini menghasilkan kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut; Pelaksanaan *civic disposition* peserta didik di kurikulum merdeka ini perlu dikembangkan dalam 4 pendekatan yaitu sebagai berikut: Pertama, pembiasaan melalui tata tertib di sekolah yang diimplementasikan melalui ayat-ayat yang ada di dalam tata tertib tersebut, dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi yang sesuai dengan bentuk pelanggarannya. Pembiasaan tata tertib di sekolah berkaitan dengan dua dari sepuluh *civic disposition* yaitu disiplin dan kompromi

Kedua, pembelajaran pada mata pelajaran pendidikan pancasila melalui monitoring harian dan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Monitoring dilakukan oleh pendidik dengan keterlibatan peserta didik melalui penilaian normatif dan sumatif, rapor P5, serta tiga dari sepuluh karakteristik *civic disposition* yaitu tanggungjawab, ketergaran, dan keterbukaan pikiran. Ketiga, dengan komitmen antara bapak/ibu guru sebagai upaya dalam membantu melaksanakan dan mengembangkan karakter kewarganegaraan (*civic disposition*) pada peserta didik. Pada komitmen melalui keteladanan, melibatkan empat dari sepuluh karakter kewarganegaraan, yaitu kesopanan, peduli, keberagaman & toleransi, serta keteguhan hati.

Keempat, dengan adanya evaluasi untuk mengetahui bagaimana progress karakter pada peserta didik untuk dilakukan perbaikan kedepannya dan memaksimalkan penguatan *civic disposition* di sekolah. Evaluasi ini dilaksanakan melalui supervisi yang dilakukan oleh sekolah. Supervisi bertujuan untuk melihat iklim guru pada saat mengajar, apakah sudah menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan pedoman pada kurikulum merdeka.

#### **5. Daftar Pustaka**

- Amran, A., Perkasa, M., Jasin, I., Satriawan, M., & Irwansyah, M. (2019). Model Pembelajaran Berbasis Nilai Pendidikan Karakter Untuk Generasi Indonesia Abad 21. *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 22(2), 233. <https://doi.org/10.24252/lp.2019v22n2i5>
- Annisa Rohimah Hasri Hasibuan, Aufa, Lola Khairunnisa, Wenni Arobiya Siregar, H. A. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak SDN 104231 Sugiharjo Kecamatan Batang Kuis. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4, 1707–1715.



- Atmaja, T. S., & Info, A. (2022). *Pembentukan civic disposition pada peserta didik*. 11, 2715–2723. <https://doi.org/10.26418/jppk.v11i7.55984>
- Eni. (2011). Strategi Pengembangan Kepemimpinan Guru di Wilayah MGMP Bahasa Indonesia Kota Depok. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., Mi, 5–24.
- Halimah, L., & Nurlela, K. (2020). Representasi Civic Disposition melalui Pendekatan Moral pada Anak Didik Masyarakat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Sukamiskin Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(1), 34–43. <https://doi.org/10.24269/jpk.v5.n1.2020.pp34-43>
- John W. Creswell. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*.
- Kristiawan, M., Yuyun Yuniarsih, Mp., Happy Fitria, Mp., & Nola Refika SPd, Mp. (2019). *Supervisi Pendidikan* (Issue April).
- Martini, E. (2022). Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Kecakapan Abad 21 Dalam Meningkatkan Kompetensi Kewarganegaraan Di Pendidikan Kejuruan. *JPK : Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(1), 9–16.
- Muchtar, D., & Suryani, A. (2019). Pendidikan Karakter Menurut Kemendikbud. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 3(2), 50–57. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v3i2.142>
- Mulyono, B. (2017). Reorientasi civic disposition dalam kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan sebagai upaya membentuk warga negara yang ideal. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 14(2), 218–225. <https://doi.org/10.21831/civics.v14i2.17007>
- Pangalila, T. (2017). *Peningkatan civic disposition siswa melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)*. 7, 91–103.
- Prihatmojo, A., Agustin, I. M., Ernawati, D., & Indriyani, D. (2019). Implementasi Pendidikan Karakter Di Abad 21. *Seminar Nasional Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan UMJ*, 180–186.
- Rahmatiani, L., & Saylendra, N. P. (2021). Pembentukan Civic Disposition Peserta Didik Berbasis Kompetensi Abad 21. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 6(2), 54–63.
- Rudiawan, R., & Asmaroini, A. P. (2022). Peran Guru Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Dalam Penguatan Profil Pelajar Pancasila Di Sekolah. *Edupedia*, 6(1), 55–63. <https://doi.org/10.24269/ed.v6i1.1332>
- Susetyo, D. I., . S., & . S. (2018). Strategi Guru Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Dalam Membentuk Karakter Peserta Didik Di Sma Negeri 1 Ponorogo Dan Sma Muhammadiyah 1 Ponorogo. *Edupedia*, 2(1), 73. <https://doi.org/10.24269/ed.v2i1.95>